

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENDAPATAN DAN EFISIENSI
BELANJA PADA LAPORAN REALISASI ANGGARAN DINAS
KOPERASI DAN UKM PROVINSI JAWA TIMUR**

TUGAS AKHIR



Oleh:

NASTITI AYU NURHASANAH

NIM 151910613069

PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI

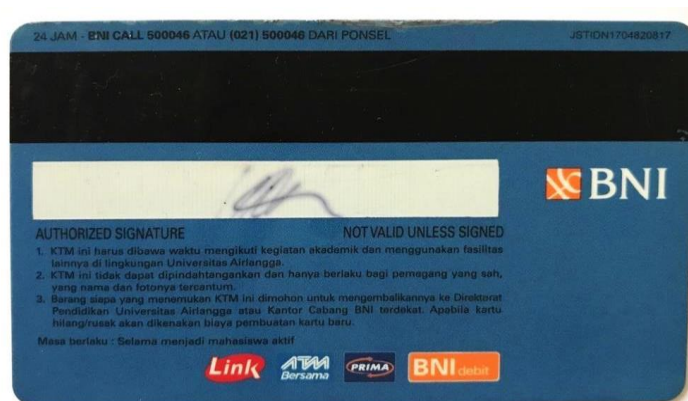
FAKULTAS VOKASI

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2022

LEMBAR KARTU TANDA MAHASISWA



HALAMAN PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT

Bagian atau keseluruhan isi Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademis pada bidang studi dan / atau Universitas lain dan tidak pernah dipublikasikan / ditulis oleh individu selain penyusun, kecuali dituliskan dengan format dalam kutipan dan dengan jelas tercantum dalam daftar Pustaka sebagai acuan penyusunan Tugas Akhir.

Apabila di kemudian hari ditemukan bukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 29 Juni 2022

Penulis



Nastiti Ayu Nurhasanah
NIM. 151910613069

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

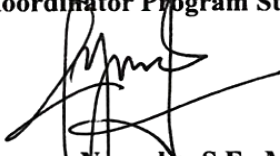
**ANALISIS EFEKTIVITAS PENDAPATAN DAN EFISIENSI BELANJA
PADA LAPORAN REALISASI ANGGARAN DINAS KOPERASI DAN
UKM PROVINSI JAWA TIMUR**

Disusun oleh:

**NASTITI AYU NURHASANAH
151910613069**

Telah disetujui dan diterima dengan baik

Koordinator Program Studi D-III Akuntansi



Yanuar Nugroho, S.E., M.Sc., Ak., CA., ACPA., AWP., CRA
NIK. 199801132015043101

Tanggal 19 Juli 2022

Dosen Pembimbing



Izmi Dwira Eriani, S.A., M.A., CAPF
NIK. 199402082020013201

Tanggal 19 Juli 2022

Humas Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur



Arief Setiawan, S.Kom., M.Sos
NIP. 198104172011011008

Tanggal 19 Juli 2022

PEDOMAN PENGGUNAAN TUGAS AKHIR

Tugas akhir ini tidak dipublikasikan, namun tersedia di perpustakaan dalam lingkungan Universitas Airlangga, diperkenankan untuk dipakai sebagai referensi kepustakaan, tetapi pengutipan harus seizin penyusun dan harus menyebutkan sumbernya sesuai kebiasaan ilmiah.

Dokumen tugas akhir ini merupakan hak milik Universitas Airlangga.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, anugerah, dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir dengan baik dan lancar. Laporan Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi mata kuliah Tugas Akhir. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini, penulis mendapat banyak doa, dukungan, dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, yang telah mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini.
2. Kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan doa dan dukungan kepada anaknya dalam menempuh studi di Universitas Airlangga.
3. Bapak Prof. Dr. Anwar Ma'aruf, drh., M.Kes. selaku Dekan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
4. Bapak Yanuar Nugroho, S.E., M.Sc., Ak., CA. sebagai Ketua Program Studi Diploma III Akuntansi Universitas Airlangga.
5. Ibu Izmi Dwira Eriani, S.A., M.A selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaganya serta selalu memberikan dukungan dan arahan dalam penyelesaian Laporan Magang.
6. Bapak Arief Setiawan, S.Kom., M.Sos. selaku Pranata Humas Ahli Pertama Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melaksanakan kegiatan magang di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur.
7. Ir. Arif Lukman Hakim M.M. selaku Kepala Bidang Pembiayaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur yang telah memberikan pengalaman kepada penulis untuk melaksanakan kegiatan magang di bidang pembiayaan.
8. Seluruh Kepala Seksi dan Staff Bidang Pembiayaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan

ilmunya kepada penulis selama melaksanakan magang di bidang pembiayaan.

9. Seluruh dosen perkuliahan yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya kepada penulis saat menempuh perkuliahan.
10. Kedua kakak kandung penulis yang telah memotivasi penulis agar segera menyelesaikan Laporan Magang.
11. Ajeng Ayu Nurfitri, Anisa Dwi Karunia, Amelia Ella Santi, dan Almas Baidury selaku teman-teman magang seperjuangan penulis di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur.
12. Sahabat-sahabat penulis yang tidak akan cukup apabila disebutkan satu per satu, yang telah menampung keluh kesah penulis dan memberikan semangat.
13. Seluruh teman Diploma III Akuntansi 2019 yang saling memberi dukungan satu sama lainnya.

Penulis menyadari bahwa laporan ini tidak luput dari kekurangan maupun kesalahan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan dengan senang hati kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan laporan ini. Semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat dan wawasan bagi para pembaca.

Surabaya, 29 Juni 2022



Penulis

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat efektivitas pendapatan dan efisiensi belanja pada laporan realisasi anggaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur dalam periode lima tahun yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif kuantitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan dalam analisis efektivitas pendapatan dan efisiensi belanja adalah laporan realisasi anggaran periode 2016-2020. Data yang diperoleh diolah dengan analisis rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pendapatan sudah efektif dikarenakan menghasilkan rasio efektivitas berada di rentang lebih dari 90%. Sedangkan, tingkat efisiensi belanja tergolong kurang efisien karena jumlah realisasi belanja yang cukup tinggi. Untuk tingkat efektivitas serta efisiensi selisih pendapatan dan belanja termasuk ke dalam kriteria kurang efektif dan kurang efisien, dikarenakan terjadi defisit dalam kurun waktu lima tahun tersebut.

Kata Kunci: Efektivitas, Efisiensi, dan Laporan Realisasi Anggaran

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the effectiveness of income and expenditure efficiency in the budget realization report of the Department of Cooperatives and SMEs of East Java Province in a five-year period, from 2016 to 2020. The research method used in this study is a quantitative descriptive research method. Data collection methods used are interviews, observation, and documentation. In this study, the data needed in the analysis of income efficiency and expenditure efficiency is the budget realization report for the 2016-2020 period. The data obtained were processed by analysis of the ratio of effectiveness and efficiency ratio. The results of this study indicate that the level of income effectiveness is effective because it produces an effectiveness ratio in the range of 90%. Meanwhile, the level of spending efficiency is relatively less efficient because the amount of spending is quite high. For the level of effectiveness and efficiency, income and expenditure are included in the criteria of being less effective and less efficient, because there was a deficit in the five-year period.

Keywords: *Effectiveness, Efficiency, and Budget Realization Report*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR KARTU TANDA MAHASISWA.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT	iii
LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN MAGANG.....	iv
PEDOMAN PENGGUNAAN TUGAS AKHIR	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan.....	3
1.4 Manfaat.....	3
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Anggaran Sektor Publik	5
2.1.1 Pengertian Anggaran.....	5
2.1.2 Pengertian Anggaran Sektor Publik.....	5
2.1.3 Fungsi Anggaran Sektor Publik	6
2.2 Laporan Realisasi Anggaran	8
2.2.1 Pengertian Laporan Realisasi Anggaran	8
2.2.2 Periode Pelaporan Realisasi Anggaran	8
2.2.3 Unsur-unsur Laporan Realisasi Anggaran	8
2.3 Pengukuran Kinerja Sektor Publik	9
2.3.1 Pengertian Pengukuran Kinerja.....	9
2.3.2 Tujuan Sistem Pengukuran Kinerja	10

2.3.3	Manfaat Pengukuran Kinerja	10
2.4	Efektivitas.....	11
2.4.1	Pengertian Efektivitas	11
2.4.2	Pengukuran Efektivitas	11
2.5	Efisiensi	12
2.5.1	Pengertian Efisiensi.....	12
2.5.2	Pengukuran Efisiensi.....	13
BAB 3	KAJIAN STUDI KASUS	15
3.1	Objek	15
3.2	Waktu	15
3.3	Metode Kajian	16
3.4	Metode Pengumpulan Data	16
BAB 4	PEMBAHASAN	17
4.1	Hasil Pelaksanaan.....	17
4.1.1	Gambaran Umum Instansi	17
4.1.2	Analisis Data	17
4.2	Pembahasan	18
4.2.1	Efektivitas Pendapatan Asli Daerah.....	18
4.2.2	Efektivitas Jumlah Pendapatan	23
4.2.3	Efisiensi Belanja Operasi	24
4.2.4	Efisiensi Belanja Modal	28
4.2.5	Efisiensi Jumlah Belanja.....	31
4.3	Solusi	33
BAB 5	KESIMPULAN DAN SARAN	35
5.1	Kesimpulan.....	35
5.2	Saran	35
DAFTAR PUSTAKA.....		37
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan.....	12
Tabel 2.2 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan.....	13
Tabel 3.1 Waktu Pelaksanaan Pengerjaan Tugas Akhir.....	15
Tabel 4.1 Rincian Pendapatan Asli Daerah 2016.....	18
Tabel 4.2 Rincian Pendapatan Asli Daerah 2017.....	19
Tabel 4.3 Rincian Pendapatan Asli Daerah 2018.....	20
Tabel 4.4 Rincian Pendapatan Asli Daerah 2019.....	21
Tabel 4.5 Rincian Pendapatan Asli Daerah 2020.....	21
Tabel 4.6 Jumlah Pendapatan Tahun 2016 - 2020.....	22
Tabel 4.7 Rincian Belanja Operasi Tahun 2016.....	24
Tabel 4.8 Rincian Belanja Operasi Tahun 2017.....	25
Tabel 4.9 Rincian Belanja Operasi Tahun 2018.....	26
Tabel 4.10 Rincian Belanja Operasi Tahun 2019.....	27
Tabel 4.11 Rincian Belanja Operasi Tahun 2020.....	27
Tabel 4.12 Rincian Belanja Modal Tahun 2016.....	28
Tabel 4.13 Rincian Belanja Modal Tahun 2017.....	29
Tabel 4.14 Rincian Belanja Modal Tahun 2018.....	29
Tabel 4.15 Rincian Belanja Modal Tahun 2019.....	30
Tabel 4.16 Rincian Belanja Modal Tahun 2020.....	31
Tabel 4.17 Jumlah Belanja Tahun 2016 – 2020.....	32

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Laporan Realisasi Anggaran Dinas Koperasi Tahun 2016

Lampiran 2 Laporan Realisasi Anggaran Dinas Koperasi Tahun 2017

Lampiran 3 Laporan Realisasi Anggaran Dinas Koperasi Tahun 2018

Lampiran 4 Laporan Realisasi Anggaran Dinas Koperasi Tahun 2019

Lampiran 5 Laporan Realisasi Anggaran Dinas Koperasi Tahun 2020

Lampiran 6 Kartu Bimbingan Tugas Akhir (TA)

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM) cukup banyak serta tersebar secara merata di wilayah tersebut. Sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 ayat 4, UKM merupakan bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, kemandirian serta saling menjaga keseimbangan dan kemajuan ekonomi nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan hadirnya UKM tersebut, mampu mendorong perekonomian di Indonesia dengan sangat signifikan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Jawa Timur, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur merupakan suatu instansi yang berperan sebagai wadah untuk pemberdayaan UKM maupun koperasi yang sedang berjalan di Provinsi Jawa Timur dan berupaya untuk selalu meningkatkan pelayanan publik di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah. Sebagai instansi yang berperan penting dalam kelangsungan UKM dan koperasi, hal ini menjadi sebuah tanggung jawab besar bagi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur untuk melakukan pengelolaan dana secara efektif dan efisien supaya senantiasa mengalami perkembangan yang dituangkan dalam sebuah bentuk laporan keuangan. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Erlina dkk. (2015:3) bahwa dalam suatu pemerintahan diperlukan adanya laporan keuangan yang handal serta dapat dipercaya agar dapat menggambarkan sumber keuangan tersebut.

Mengacu pada PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan dan sesuai terkait dengan posisi keuangan serta seluruh transaksi yang di-

lakukan oleh suatu entitas dalam kurun periode tertentu yang digunakan untuk membandingkan realisasi anggaran pendapatan, belanja, transfer dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, komponen laporan keuangan pokok terdiri dari: (1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (3) Neraca; (4) Laporan Operasional; (5) Laporan Arus Kas; (6) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (7) Catatan Atas Laporan Keuangan.

Untuk dapat melihat seberapa baiknya suatu pengelolaan keuangan, maka perlu dilakukan pengukuran kinerja keuangan agar mengetahui keberhasilan dan kemampuan suatu instansi dalam mengelola aset yang dimiliki. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu mengukur kinerja pada belanja daerah, dikarenakan hal ini bukan hanya sekedar kemampuan mengenai uang publik dibelanjakan, melainkan meliputi kemampuan dalam menunjukkan pengelolaan uang publik tersebut telah digunakan secara efektif dan efisien. Efektif berarti penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target atau tujuan untuk kepentingan publik, efisien berarti penggunaan dana tersebut mampu menghasilkan *output* yang stabil dan maksimal.

Penelitian ini menggunakan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2020 guna mendapatkan hasil yang akurat. Hal ini dikarenakan LRA merupakan salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang dinilai paling utama serta memberikan informasi terkait realisasi anggaran secara keseluruhan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efektifitas dan efisiensi. Dengan adanya LRA yang disajikan, pengguna laporan keuangan dapat mengetahui secara pasti besarnya anggaran belanja dengan jumlah realisasinya yang dapat dinyatakan dalam bentuk nominal maupun persentase. Berdasarkan latar belakang di atas, maka Laporan Tugas Akhir ini berjudul “Analisis Efektivitas Pendapatan dan

Efisiensi Belanja Pada Laporan Realisasi Anggaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah rasio efektivitas pendapatan dan efisiensi belanja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016-2020?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan dari penyusunan Laporan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas pengelolaan pendapatan dan efisiensi belanja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur dalam Laporan Realisasi Anggaran tahun 2016-2020.

1.4 Manfaat

Manfaat penyusunan Laporan Tugas Akhir adapun sebagai berikut:

1. Bagi Penulis
 - a. Memenuhi kompetensi mata kuliah Magang dan Tugas Akhir sebagai syarat kelulusan mahasiswa Program Studi Diploma III Akuntansi Universitas Airlangga.
 - b. Menumbuhkan rasa tanggungjawab serta profesionalisme dalam mengemban tugas yang diberikan.
2. Bagi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur
 - a. Memberikan kontribusi maupun kesempatan kepada masyarakat, khususnya mahasiswa untuk terjun langsung dalam dunia kerja.
 - b. Memanfaatkan tenaga pendidik sesuai dengan kebutuhan di bidang masing-masing.
 - c. Menjalin hubungan kerja sama yang baik antara Universitas Airlangga dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur.

3. Bagi Pembaca

- a. Menambah pengetahuan serta wawasan bagi para pembaca sesuai dengan topik yang diteliti.
- b. Sebagai referensi untuk penyusunan Laporan Tugas Akhir atau suatu penelitian selanjutnya dengan rumusan masalah yang lebih kompleks.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Anggaran Sektor Publik

2.1.1 Pengertian Anggaran

Berdasarkan PSAP No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran (LRA), anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah serta disusun secara sistematis untuk satu periode. Menurut Mardiasmo (2011:61) menjelaskan definisi anggaran sebagai berikut: “Anggaran adalah pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan performa maupun kinerja perusahaan. Bagi suatu perusahaan, penyusunan anggaran merupakan alat yang dipakai untuk membantu aktivitas kegiatannya agar lebih terarah, misalnya untuk alat perencanaan, alat pengendalian dan lainnya.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan suatu perencanaan dan pengendalian keuangan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan disusun secara sistematis dalam jangka waktu tertentu yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran tersebut.

2.1.2 Pengertian Anggaran Sektor Publik

Dewasa ini terdapat banyak pengertian mengenai anggaran sektor publik, dikarenakan begitu luasnya cakupan wilayah sektor publik tersebut, sehingga setiap insan memiliki cara pandang masing-masing. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, pengertian sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik (Mardiasmo, 2011:2). Dengan demikian, sektor publik merupakan suatu wadah pemerintah untuk menghasilkan

barang dan pelayanan publik memenuhi kebutuhan publik dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat dan menyusun seluruh kegiatan serta program kerja dalam sebuah anggaran. Sementara itu, Mardiasmo (2011:15) menjelaskan pengertian anggaran sektor publik yaitu “instrument akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program dan dibiayai dengan uang publik”.

Dari beberapa sudut pandang tersebut dapat disimpulkan bahwa anggaran sektor publik merupakan suatu rencana keuangan yang menyatakan rincian dari keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sektor publik, yang direpresentasikan dalam bentuk rencana pendapatan dan pengeluaran yang dinyatakan dalam satuan moneter dan didanai dengan uang publik.

2.1.3 Fungsi Anggaran Sektor Publik

Bagi organisasi sektor publik seperti pemerintah, anggaran tidak hanya sebuah rencana tahunan tetapi juga merupakan bentuk akuntabilitas atas pengelolaan dana publik yang dibebankan kepadanya.

Menurut Halim dan Kusufi (2016:48) mengidentifikasikan bahwa anggaran sektor publik memiliki beberapa fungsi utama yaitu sebagai berikut:

1. Anggaran Sebagai Alat Perencanaan (*Planning Tool*)

Anggaran sektor publik digunakan untuk merencanakan kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh organisasi sektor publik beserta rincian biaya yang dibutuhkan dan rencana sumber pendapatan yang akan diperoleh organisasi sektor publik.

2. Anggaran Sebagai Alat Pengendalian (*Control Tool*)

Anggaran sebagai alat pengendali manajerial berfungsi untuk meyakinkan organisasi sektor publik bahwa organisasi mempunyai sumber dana untuk membiayai rencana program-program organisasi. Anggaran sebagai pengendali manajemen organisasi untuk tidak melakukan pemborosan dan bekerja secara efisien tanpa ada korupsi.

3. Anggaran Sebagai Alat Kebijakan Fiskal (*Fiscal Tool*)

Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal digunakan untuk mengetahui kebijakan fiskal yang akan dijalankan organisasi sektor publik.

4. Anggaran Sebagai Alat Politik (*Political Tool*)

Anggaran dapat digunakan sebagai alat politik yaitu bentuk dokumen politik yang dapat dijadikan komitmen kesepakatan eksekutif dan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu.

5. Anggaran Sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi (*Coordination and Communication Tool*)

Proses penyusunan anggaran dilakukan koordinasi dan komunikasi antar unit kerja. perencanaan dan pelaksanaan anggaran harus dikomunikasikan keseluruhan bagian organisasi.

6. Anggaran Sebagai Alat Penilaian Kinerja (*Performance Measurement Tool*)

Perencanaan anggaran dan pelaksanaannya akan menjadi penilaian kinerja manajemen organisasi publik.

7. Anggaran Sebagai Alat Motivasi (*Motivation Tool*)

Anggaran dapat digunakan untuk memberi motivasi bagi pimpinan dan karyawan dalam bekerja secara efektif dan efisien.

8. Anggaran Sebagai Alat untuk Menciptakan Ruang Publik (*Public Sphere*)

Anggaran publik dapat digunakan sebagai alat untuk menciptakan ruang publik, dimana keberadaan anggaran tidak boleh diabaikan oleh berbagai organisasi sektor publik seperti kabinet, birokrat dan DPR/MPR, maupun masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

2.2 Laporan Realisasi Anggaran

2.2.1 Pengertian Laporan Realisasi Anggaran

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan laporan mengenai perbandingan antara anggaran pendapatan dan belanja dengan realisasi dalam satu periode pelaporan. Laporan Relisasi Anggaran (LRA) terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan.

2.2.2 Periode Pelaporan Realisasi Anggaran

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, PSAP 02 mengenai Laporan Realisasi Anggaran paragraf 10, Periode pelaporan realisasi anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan realisasi anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut:

- a. Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;
- b. Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam laporan realisasi anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat dibandingkan.

2.2.3 Unsur-unsur Laporan Realisasi Anggaran

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Realisasi Anggaran mencakup unsur-unsur berikut ini:

1. Pendapatan, terdiri atas tiga komponen yaitu:
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - b. Pendapatan Transfer;
 - c. Lain-lain,

2. Belanja, diklasifikasikan menjadi tiga pos yaitu:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tak Terduga.

3. Transfer

Transfer pada dasarnya juga merupakan bagian dari belanja pemerintah. Untuk pemerintah provinsi pengeluaran transfer berupa Transfer/Bagi Hasil pendapatan ke Kabupaten/Kota.

4. Surplus/Defisit

Surplus/defisit merupakan selisih antara pendapatan dan belanja dicatat dalam pos surplus/defisit. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode anggaran, sedangkan defisit merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja selama satu periode anggaran.

5. Pembiayaan, dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Penerimaan Pembiayaan
- b. Pengeluaran

6. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah selama periode anggaran. SiLPA/SiKPA dapat dihitung dari nilai pada pos Surplus/Defisit ditambah dengan pos pembiayaan neto.

2.3 Pengukuran Kinerja Sektor Publik

2.3.1 Pengertian Pengukuran Kinerja

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya

jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan (Mahsun, 2016:25).

Menurut Mahmudi (2015:21), kinerja organisasi tidak semata-mata dipengaruhi oleh kinerja individual atau kinerja tim saja, namun dipengaruhi oleh faktor yang lebih luas dan kompleks, misalnya faktor lingkungan baik internal maupun eksternal. Faktor lingkungan meliputi faktor ekonomi, sosial, politik, keamanan dan hukum yang didalamnya organisasi beroperasi. Selain faktor lingkungan eksternal, faktor lain yang mempengaruhi kinerja organisasi adalah kepemimpinan, struktur organisasi, strategi pilihan, dukungan teknologi, kultur organisasi dan proses organisasi. Pengukuran kinerja sektor publik meliputi aktivitas penetapan serangkaian ukuran atau indikator kinerja yang memberikan informasi sehingga memungkinkan bagi unit kerja sektor publik untuk memonitor kinerjanya dalam menghasilkan *output* dan *outcome* terhadap masyarakat.

2.3.2 Tujuan Sistem Pengukuran Kinerja

Menurut Ulum (2012:21) secara umum tujuan sistem pengukuran kinerja adalah yaitu untuk mengomunikasikan strategi secara lebih baik (*top down and botton up*); untuk mengukur kinerja finansial dan nonfinansial secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi; untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai *goal congruence*; serta sebagai alat untuk mencapai keputusan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

2.3.3 Manfaat Pengukuran Kinerja

Menurut Mahsun (2016:33) manfaat pengukuran kinerja antara lain memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen; memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan; untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja; sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (*reward &*

punishment) secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati; sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi; membantu mengidentifikasi apakah keputusan pelanggan sudah terpenuhi; membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah; dan memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

2.4 Efektivitas

2.4.1 Pengertian Efektivitas

Efektivitas merupakan keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan hanya berbicara seputar *output* saja (Bastian, 2010:78). Dikatakan efektif, apabila suatu organisasi telah berhasil mencapai suatu tujuan tersebut.

Sementara itu, Mardiasmo (2011:132) menjelaskan bahwa efektivitas adalah hubungan antara keluaran dengan tujuan ataupun sasaran yang harus dicapai. Suatu kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran keberhasilan atau tidak pada organisasi dalam mencapai tujuannya.

2.4.2 Pengukuran Efektivitas

Menurut Mahsun (2016:168) pengukuran efektivitas mengukur tingkat *output* dari organisasi sektor publik terhadap target pendapatan sektor publik. Tingkat efektivitas pendapatan dapat diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran pendapatan dengan target pendapatan.

Berikut ini merupakan formula untuk mengukur tingkat efektifitas sebuah anggaran belanja:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996, kriteria tingkat efektivitas anggaran belanja dapat dilihat seperti tabel di bawah ini:

Tabel 2.1 Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

Persentase	Kriteria Efektivitas
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Kemendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

Berdasarkan kriteria efektivitas kinerja keuangan di atas, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Apabila memperoleh hasil rasio lebih dari 100%, maka dapat dikatakan sangat efektif.
2. Apabila memperoleh hasil rasio antara 90% - 100%, maka dapat dikatakan efektif.
3. Apabila memperoleh hasil rasio antara 80% - 90%, maka dapat dikatakan cukup efektif.
4. Apabila memperoleh hasil rasio antara 60% - 80%, maka dapat dikatakan kurang efektif.
5. Apabila memperoleh hasil rasio kurang dari 60%, maka dapat dikatakan tidak efektif.

2.5 Efisiensi

2.5.1 Pengertian Efisiensi

Menurut Sedarmayanti (2014:22) efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat atau sedikit penggunaan sumber

daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Sedangkan, menurut Bastian (2010:85) efisiensi adalah *input* yang tersedia mampu menghasilkan *output* pada tingkat yang paling optimal bagi kepentingan masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa efisiensi adalah *output* yang dihasilkan dengan *input* yang digunakan menjadi suatu kesatuan yang optimal.

2.5.2 Pengukuran Efisiensi

Mahsun (2016:183) menjelaskan bahwa pengukuran efisiensi mengukur perbandingan tingkat *output* dengan tingkat *input* dari organisasi sektor publik. Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan total realisasi anggaran belanja.

Suatu organisasi dikatakan efisien jika program-program atau kegiatan yang sudah dirancang mampu untuk dilaksanakan dengan menggunakan input yang serendah-rendahnya.

Untuk mengukur tingkat efisiensi anggaran belanja menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Adapun kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja dapat dilihat seperti tabel di bawah ini:

Tabel 2.2 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Persentase	Kriteria Efisiensi
>100%	Tidak Efisien
90-100%	Kurang Efisien
80-90%	Cukup Efisien
60-80%	Efisien
<60%	Sangat Efisien

Sumber: Kemendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

Berdasarkan tabel kriteria efisiensi tersebut, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Apabila perolehan hasil rasio menunjukkan perbandingan lebih dari 100%, maka dapat dikatakan tidak efisien.
2. Apabila perolehan hasil rasio menunjukkan perbandingan 90%-100%, maka dapat dikatakan kurang efisien.
3. Apabila perolehan hasil rasio menunjukkan perbandingan 80%-90%, maka dapat dikatakan cukup efisien.
4. Apabila perolehan hasil rasio menunjukkan perbandingan 60%-80%, maka dapat dikatakan efisien.
5. Apabila perolehan hasil rasio menunjukkan perbandingan kurang dari 60%, maka dapat dikatakan sangat efisien.

BAB 3

KAJIAN STUDI KASUS

3.1 Objek

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Provinsi Jawa Timur merupakan instansi yang menaungi koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur serta mengupayakan untuk selalu mendukung seluruh kegiatan koperasi dan pelaku UKM. Kegiatan penelitian ini dilakukan di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Provinsi Jawa Timur yang berlokasi di Jl. Raya Bandara Juanda No. 22, Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur 61253.

3.2 Waktu

Kegiatan penelitian yang dilaksanakan selama tiga bulan ini dimulai pada tanggal 7 Maret 2022 – 7 Juni 2022. Kegiatan dimulai pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB. Kegiatan penyusunan tugas akhir ini ditempatkan di bidang pembiayaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur.

Tabel 3.1 Waktu Pelaksanaan Pengerjaan Tugas Akhir

Kegiatan	Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pembekalan Tugas Akhir																								
Penentuan Topik dan Dosen Pembimbing																								
Pengajuan Izin Permohonan Pengambilan Data																								
Perolehan Data																								
Penyusunan Tugas Akhir																								
Pengumpulan Laporan																								

Sumber: Data Diolah, 2022

3.3 Metode Kajian

Metode analisis data yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Metode deskriptif kuantitatif merupakan analisis data dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2015:207).

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data guna menyusun Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Pengumpulan data melalui tanya jawab kepada staf khususnya bagian keuangan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur sebagai narasumber yang relevan terhadap penelitian yang dilakukan.

2. Observasi

Observasi yang dilakukan selama tiga bulan merupakan bentuk proses pengumpulan data dengan cara terjun secara langsung terhadap kegiatan operasional Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur.

3. Dokumentasi

Mengumpulkan berbagai dokumen-dokumen keuangan terkait yang menunjang penelitian serta mempelajari literatur atau referensi terkait yang terdapat di dalam buku maupun jurnal ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.

BAB 4

PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pelaksanaan

4.1.1 Gambaran Umum Instansi

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Provinsi Jawa Timur merupakan sebuah instansi pemerintah yang berfungsi untuk memberikan bimbingan, pengawasan, perlindungan serta fasilitas terhadap koperasi dan UKM yang terdapat di Provinsi Jawa Timur. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa timur senantiasa mendukung kegiatan operasional koperasi dan UKM yang berada di Jawa Timur. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur diibaratkan sebagai suatu wadah untuk menampung koperasi dan UKM yang ada di Jawa Timur. Selain itu, juga melakukan pemberdayaan guna mengembangkan dan meningkatkan kualitas masing-masing usaha. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur memiliki beberapa kegiatan pokok, seperti usaha simpan pinjam, melakukan pengawasan dan pemeriksaan koperasi, penilaian kesehatan koperasi, pemberdayaan dan pengembangan UKM, serta menyediakan modal guna koperasi maupun UKM.

4.1.2 Analisis Data

Sebagai salah satu instansi pemerintahan, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur perlu memperhatikan faktor-faktor penting yang mendukung kinerja instansi, mengingat bahwa instansi pemerintahan berhubungan sangat erat dengan pelayanan publik. Dalam memberikan pelayanan publik yang terbaik, tentunya hal ini menjadi acuan bagi instansi pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas layanannya dengan cara memastikan penyerapan anggaran telah berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Oleh sebab itu, sangat penting dilakukan adanya pengukuran efektivitas pendapatan dan efisiensi belanja pada laporan realisasi anggaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Terdapat beberapa komponen dalam Pendapatan Daerah diantaranya adalah Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2001). Tujuan PAD yang termuat di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 3, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Semakin tinggi PAD yang dimiliki oleh daerah maka akan semakin tinggi kemampuan daerah untuk melaksanakan desentralisasi. Berikut ini merupakan rincian dan rasio efektivitas dari Pendapatan Asli Daerah tahun 2016 hingga tahun 2020.

Tabel 4.1 Rincian Pendapatan Asli Daerah 2016

Uraian	Anggaran	Realisasi	Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
Retribusi Daerah				
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	20.000.000	24.930.000	124,65	Sangat Efektif
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah				
Pendapatan dari Pengembalian Pembayaran Belanja	0	181.035.700	-	-
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	320.000.000	320.503.946,99	100,16	Sangat Efektif
Pendapatan Sewa Tanah	12.800.000	14.800.000	115,63	Sangat Efektif
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	352.800.000	541.269.646,99	153,42	Sangat Efektif

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

Berdasarkan rincian pada tabel 4.1 dapat ditarik kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016 tergolong sangat efektif dalam perealisasiannya. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai realisasi sebesar Rp 541.269.646,99 melebihi jumlah anggarannya yang sebesar Rp 352.800.000, dikarenakan terdapat adanya pemasukan pada Pendapatan dari Pengembalian Pembayaran Belanja. Dengan demikian, menunjukkan bahwa Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016 telah berhasil dalam mewujudkan tingkat efektivitas pendapatan yang sangat baik.

Tabel 4.2 Rincian Pendapatan Asli Daerah 2017

Uraian	Anggaran	Realisasi	Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
Retribusi Daerah				
Retirubsi Pemakaian Kekayaan Daerah	20.000.000	23.490.000	117,45	Sangat Efektif
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah				
Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0	11.885.048	-	-
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0	540.000,00	-	-
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0	3.040.000	-	-
Pendapatan Dari Pengembalian Pembayaran Belanja	0	64.131.138,00	-	-
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	320.000.000	176.627.873,14	55,20	Tidak Efektif
Pendapatan Sewa Tanah	13.800.000	14.800.000	107,25	Sangat Efektif
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	353.800.000	294.514.059	83,24	Cukup Efektif

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur Tahun 2017

Dari rincian pada tabel 4.2 dapat diketahui bahwa pendapatan asli daerah Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur tergolong cukup efektif dalam realisasinya. Realisasi pendapatan asli daerah tahun anggaran 2017 sebesar

Rp294.514.059,14 apabila dihadapkan dengan target pendapatan sebesar Rp353.800.000, terdapat realisasi pendapatan sebesar 83,24%. Namun, pada bagian hasil pengelolaan dana bergulir, realisasinya tergolong ke dalam tidak efektif. Realisasi lain-lain Penerimaan yang sah Tahun 2017 sebesar Rp 271.024.059,14 dari target pendapatan sebesar Rp 333.800.000 atau mencapai 81,19 %, bila dibanding dengan dengan realisasi periode anggaran tahun 2016 sebesar Rp516.339.646,99 dari target pendapatan sebesar Rp332.800.000 atau mencapai 155,15%. Penurunan realisasi tahun 2017 disebabkan terdapat penurunan atas pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja sebesar Rp 79.596.186 merupakan pendapatan yang tidak ditargetkan dan Sewa Tanah sebesar Rp 14.800.000,00 sedangkan Penerimaan Pengelolaan Dana bergulir tercapai sebesar Rp 176.627.873,14. Pada pos pengelolaan dana bergulir menunjukkan belum tercapainya target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan karena operasional program dana bergulir masih belum sepenuhnya dimaksimalkan dengan baik, sehingga jumlah realisasi anggarannya belum memenuhi target.

Tabel 4.3 Rincian Pendapatan Asli Daerah 2018

Uraian	Anggaran	Realisasi	Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
Retribusi Daerah	5.000.000	3.000.000	60	Kurang Efektif
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	334.800.000	233.663.027	69,79	Kurang Efektif
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	339.800.000	236.663.027	69,64	Kurang Efektif

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur Tahun 2018

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui pendapatan asli daerah Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018 termasuk ke dalam kategori kurang efektif dalam perealisasi anggarannya. Apabila dibandingkan dengan periode anggaran sebelumnya, yaitu tahun 2017, jumlah pendapatan asli daerah mengalami penurunan. Realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp 236.663.027 lebih rendah apabila dibandingkan dengan target anggaran sejumlah Rp

339.800.000. Hal ini disebabkan oleh jumlah realisasi dari lain-lain pendapatan asli daerah memiliki perbedaan yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan target anggaran sebesar Rp 334.800.000. Beberapa faktor penyebab tingkat efektivitas dalam kategori kurang efektif tersebut adalah tidak tercapainya target pada retribusi daerah, dimana dalam pemungutan retribusi daerah masih kurang giat digencarkan sehingga jumlah realisasinya lebih rendah dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Selain itu, pada pos lain-lain pendapatan asli daerah terdapat pengelolaan dana bergulir. Pada tahun ini, keberadaan program dana bergulir juga masih belum dimaksimalkan, sehingga memperoleh jumlah realisasi yang lebih rendah dari jumlah anggaran yang telah ditetapkan.

Tabel 4.4 Rincian Pendapatan Asli Daerah 2019

Uraian	Anggaran	Realisasi	Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
Pajak Daerah	-	-		
Retribusi Daerah	5.000.000	5.000.000	100	Efektif
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-		
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	345.000.000	417.680.407,49	121,06	Sangat Efektif
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	350.000.000	422.680.407,49	120,76	Sangat Efektif

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur Tahun 2019

Dapat dilihat pada tabel 4.4 disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 tergolong sangat efektif dalam mewujudkan realisasi anggaran pendapatan asli daerah. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai realisasi sebesar Rp 422.680.407,49 jauh lebih tinggi dari jumlah anggarannya yang sebesar Rp 350.000.000.

Tabel 4.5 Rincian Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020

Uraian	Anggaran	Realisasi	Rasio (%)	Kriteria
Retribusi Daerah	5.000.000	5.000.000	100	
Pajak Daerah	-	-		
Retribusi Daerah	5.000.000	5.000.000	100	Efektif
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-		
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	212.300.000	396.203.731,42	186,62	Sangat Efektif
Pendapatan dari Pengembalian Pembayaran Perjalanan Dinas	0	11.750.000		
Pendapatan dari Pengembalian Pembayaran Belanja	0	3.963.345		
Pendapatan Sewa Tanah	22.300.000	22.300.000	100	Efektif
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	190.000.000	358.190.386,42	188,52	Sangat Efektif
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	217.300.000	401.203.731,42	184,63	Sangat Efektif

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur Tahun 2020

Berdasarkan rincian tabel 4.5 dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 tergolong sangat efektif dalam mewujudkan realisasi anggaran pendapatan asli daerah. Kenaikan realisasi tahun 2020 disebabkan potensi pendapatan atas bunga angsuran dana bergulir dan pendapatan yang tidak ditargetkan. Dapat dilihat dari jumlah realisasi anggaran sebesar Rp 401.203.731,42 lebih tinggi dari jumlah anggarannya sebesar Rp 217.300.000, dengan demikian menunjukkan bahwa pada tahun ini Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur telah berhasil mewujudkan tingkat efektivitas pendapatan yang sangat baik.

4.2.2 Efektivitas Jumlah Pendapatan

Tabel 4.6 Jumlah Pendapatan Tahun 2016 - 2020

Tahun	Anggaran	Realisasi	Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
2016	352.800.000	541.269.646,99	153,42	Sangat Efektif
2017	353.800.000	294.514.059,14	83,24	Cukup Efektif
2018	339.800.000	236.663.027	69,64	Kurang Efektif
2019	350.000.000	422.680.407,49	120,76	Sangat Efektif
2020	217.300.000	401.203.731,42	184,63	Sangat Efektif

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 - 2020

Berdasarkan penjabaran tabel 4.6 selama periode anggaran 2016 – 2020 tingkat efektivitas dari jumlah pendapatan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur mengalami fluktuasi di setiap tahunnya. Pada tahun 2016, terbilang sangat efektif dikarenakan mengalami peningkatan sebesar 153,42% dari target anggaran semula sebesar Rp 352.800.000 dan terealisasi sebesar Rp 541.269.646,99. Selanjutnya pada tahun 2017 tingkat efektivitas mengalami penurunan yang cukup pesat dan dapat dibuktikan dengan tingkat efektivitas pada tahun 2017 jauh lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 83,24% dengan target anggaran sebesar Rp 353.800.000 dan hanya terealisasi sebesar Rp 294.514.059,14. Meskipun mengalami penurunan tingkat efektivitas dibanding tahun anggaran sebelumnya, periode anggaran 2017 masih tetap masuk ke dalam kategori cukup efektif karena tingkat efektivitas masih berada diantara 80% - 90%. Pada periode selanjutnya yaitu tahun 2018 kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan dan dapat dibuktikan dari tingkat efektivitas sebesar 69,64% dengan target anggaran sebesar Rp 339.800.000 serta terealisasi sebesar Rp 236.663.027. Dikarenakan tingkat efektivitas berada di kisaran antara 60% - 80%, maka tergolong kategori kurang efektif. Untuk periode selanjutnya yaitu tahun 2019, mengalami kenaikan yang sangat luar biasa apabila dibandingkan dengan dua tahun

sebelumnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan tingkat efektivitas pada tahun 2019 sebesar 120,76% dengan jumlah realisasinya sebesar Rp 422.680.407,49 dengan target anggaran yang sebesar Rp 350.000.000. Kemudian pada periode anggaran tahun berikutnya yaitu tahun 2020 tingkat efektivitas kembali mengalami peningkatan yang dapat dibuktikan dengan adanya tingkat efektivitas sebesar 184,63% dan tergolong ke dalam kategori sangat efektif, dengan target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 217.300.000 dan direalisasikan sebesar Rp 401.203.731,42.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat efektivitas pendapatan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016 – 2020 mengalami fluktuasi di setiap tahun. Periode anggaran dengan tingkat efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 184,63% kemudian disusul dengan periode anggaran tahun 2019 sebesar 120,76%. Meskipun sempat terjadi peningkatan yang cukup pesat beberapa kali, namun masih terdapat dua periode anggaran yang dapat terbilang kurang efektif yaitu pada tahun 2017 dan 2018 dikarenakan realisasi anggaran belanja masih belum sesuai dengan target anggaran yang telah ditentukan. Pada tahun 2017 dan 2018, terdapat kategori cukup efektif maupun kurang efektif. Penyebab penurunan kriteria ini pada dua tahun berturut-turut adalah ketidakmaksimalan pemanfaatan dan pengelolaan program dana bergulir, sehingga jumlah realisasinya belum tercapai dari target yang telah dianggarkan.

4.2.3 Efisiensi Belanja Operasi

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), komponen belanja daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja lain-lain, dan Belanja Transfer. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

Tabel 4.7 Rincian Belanja Operasi Tahun 2016

Uraian	Anggaran	Realisasi	Rasio Efisiensi (%)	Kriteria
Belanja Pegawai	24.535.476.325	23.031.260.750	93,86	Kurang Efisien
Belanja Barang dan Jasa	82.276.806.020	80.219.060.841	97,49	Kurang Efisien
Belanja Bunga	-	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-	-
Belanja Hibah	-	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
Jumlah Belanja Operasi	106.812.282.345	103.250.321.591	96,66	Kurang Efisien

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

Pada tabel 4.7 menunjukkan tingkat efisiensi belanja operasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur tahun 2016 tergolong kurang efisien dalam perealisasiannya. Dengan realisasi anggaran belanja operasi sebesar Rp 103.250.321.591 dari awal target yang dianggarkan sebesar Rp 106.812.282.345, menghasilkan rasio efisiensi sebesar 96,66%. Dikarenakan berada pada persentase antara 90%-100%, maka tergolong ke dalam kategori kurang efisien.

Tabel 4.8 Rincian Belanja Operasi Tahun 2017

Uraian	Anggaran	Realisasi	Rasio Efisiensi (%)	Kriteria
Belanja Pegawai	23.684.980.892	21.918.170.281	92,54	Kurang Efisien
Belanja Barang dan Jasa	73.311.638.447	71.421.154.830	97,42	Kurang Efisien
Belanja Bunga	-	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-	-
Belanja Hibah	-	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
Jumlah Belanja Operasi	96.996.619.339	93.339.325.111	96,22	Kurang Efisien

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur Tahun 2017

Berdasarkan tabel 4.8 mengenai belanja operasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur periode anggaran tahun 2017, tingkat rasio efisiensi belanja operasi masuk ke dalam kategori kurang efisien. Jumlah belanja operasi pada tahun ini cenderung menurun apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2016. Dengan anggaran belanja operasi sebesar Rp 96.996.619.339 dan realisasi anggaran belanja operasi sebesar Rp 93.339.325.111 menghasilkan rasio efisiensi sebesar 96,66%.

Tabel 4.9 Rincian Belanja Operasi Tahun 2018

Uraian	Anggaran	Realisasi	Rasio Efisiensi (%)	Kriteria
Belanja Pegawai	22.880.497.700	21.774.590.537	95,16	Kurang Efisien
Belanja Barang dan Jasa	59.523.210.818	57.996.919.362	97,43	Kurang Efisien
Belanja Bunga	-	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-	-
Belanja Hibah	-	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
Jumlah Belanja Operasi	84.859.553.618	82.153.297.184	96,81	Kurang Efisien

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa

Timur Tahun 2018

Dapat diketahui dari tabel 4.9 mengenai rincian belanja operasi periode anggaran tahun 2018, disimpulkan bahwa tingkat efisiensi belanja operasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur tergolong masih kurang efisien seperti halnya tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun ini, terjadi penurunan belanja operasi yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya. Anggaran belanja operasi yang telah ditetapkan sebesar Rp 84.859.553.618 dengan jumlah realisasi belanja operasi sebesar Rp 82.153.297.184, menghasilkan rasio efisiensi sebesar 96,81%.

Tabel 4.10 Rincian Belanja Operasi Tahun 2019

Uraian	Anggaran	Realisasi	Rasio Efisiensi (%)	Kriteria
Belanja Pegawai	33.324.954.638	31.864.023.341	95,61	Kurang Efisien
Belanja Barang dan Jasa	57.828.669.562	56.082.358.103	96,98	Kurang Efisien
Belanja Bunga	-	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-	-
Belanja Hibah	-	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
Jumlah Belanja Operasi	91.153.624.200	87.946.381.444	96,48	Kurang Efisien

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur Tahun 2019

Mengacu pada tabel 4.10 dapat diketahui bahwa tingkat efisiensi belanja operasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur periode anggaran tahun 2019 tergolong kurang efisien. Namun, pada tahun ini mengalami kenaikan dalam belanja operasi apabila dibandingkan dengan periode anggaran sebelumnya yaitu tahun 2018. Hal ini disebabkan karena anggaran dalam belanja pegawai juga terjadi peningkatan jumlah. Dengan jumlah anggaran belanja sebesar Rp 91.153.624.200 dan jumlah realisasi belanja operasi sebesar Rp 87.946.381.444 mampu menghasilkan rasio efisiensi sebesar 96,48%.

Tabel 4.11 Rincian Belanja Operasi Tahun 2020

Uraian	Anggaran	Realisasi	Rasio Efisiensi (%)	Kriteria
Belanja Pegawai	28.775.784.200	27.991.309.764	97,27	Kurang Efisien
Belanja Barang dan Jasa	27.510.665.250	26.431.344.092	96,08	Kurang Efisien
Belanja Bunga	-	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-	-
Belanja Hibah	-	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
Jumlah Belanja Operasi	56.286.449.450	54.422.653.856	96,69	Kurang Efisien

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur Tahun 2020

Dapat diketahui dari tabel 4.11 mengenai rincian belanja operasi periode anggaran tahun 2020 masih dalam kategori kurang efisien. Apabila dibandingkan dengan periode anggaran sebelumnya, yaitu tahun 2019, pada tahun ini mengalami penurunan jumlah belanja operasi yang cukup tinggi. Dapat dibuktikan melalui terpangkasnya anggaran belanja barang dan jasa yang cukup banyak, sehingga memengaruhi jumlah belanja operasi pula. Dengan demikian, jumlah anggaran belanja operasi yang telah ditetapkan pada tahun 2020 sebesar Rp 56.286.449.450 dan mampu terealisasi sebesar Rp 54.422.653.856, menghasilkan rasio efisiensi sebesar 96,69%.

4.2.4 Efisiensi Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya milik pemerintah yang digunakan untuk kegiatan operasional maupun inventaris. Komponen belanja modal pada umumnya terdiri atas belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal Gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya, serta belanja modal aset lainnya.

Tabel 4.12 Rincian Belanja Modal Tahun 2016

Uraian	Anggaran	Realisasi	Rasio Efisiensi (%)	Kriteria
Jumlah belanja modal	3.743.813.730	3.632.183.129	97,02	Kurang Efisien

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa

Timur Tahun 2016

Dapat dilihat pada tabel 4.12 mengenai belanja modal Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur periode anggaran tahun 2016 tergolong kurang efisien. Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah anggaran belanja operasi yang telah ditetapkan sebesar Rp 3.743.813.730 dan terealisasi sebesar Rp 3.632.183.129 menghasilkan rasio efisiensi sebesar 97,02%. Dikarenakan rasio berada dalam rentang 90%-100%, maka termasuk ke dalam kriteria kurang efisien.

Tabel 4.13 Rincian Belanja Modal Tahun 2017

Uraian	Anggaran	Realisasi	Rasio Efisiensi (%)	Kriteria
Jumlah belanja modal	5.874.163.840	5.537.378.619	94,27	Kurang Efisien

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur Tahun 2017

Mengacu pada tabel 4.13 mengenai belanja modal Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur periode anggaran tahun 2017 tergolong kurang efisien. Namun, apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu tahun 2016, terjadi kenaikan dalam jumlah anggaran belanja modal dan realisasinya. Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah anggaran belanja modal yang telah ditetapkan pada tahun ini sebesar Rp 5.874.163.840 dengan jumlah realisasi belanja modal sebesar Rp 5.537.378.619 mampu menghasilkan rasio efisiensi sebesar 94,27%.

Tabel 4.14 Rincian Belanja Modal Tahun 2018

Uraian	Anggaran	Realisasi	Rasio Efisiensi (%)	Kriteria
Jumlah belanja modal	2.455.845.100	2.381.787.285	96,98	Kurang Efisien

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur Tahun 2018

Dari tabel 4.14 dapat ditarik kesimpulan bahwa belanja modal Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur tahun 2018 berjalan kurang efisien. Pada tahun ini terjadi penurunan yang sangat signifikan terhadap jumlah anggaran belanja modal maupun jumlah realisasinya apabila dibandingkan dengan periode anggaran sebelumnya, yaitu tahun 2017. Dengan anggaran belanja modal sebesar Rp 2.455.845.100 dan jumlah realisasi belanja modal sebesar Rp 2.381.787.285 menghasilkan rasio efisiensi sebesar 96,98%.

Tabel 4.15 Rincian Belanja Modal Tahun 2019

Uraian	Anggaran	Realisasi	Rasio Efisiensi (%)	Kriteria
Belanja Modal Tanah	-	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.972.392.000	1.739.166.413	88,18	Cukup Efisien
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi, & Jaringan	-	-	-	-
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	25.000.000	24.420.000	97,68	Kurang Efisien
Belanja Modal Aset Lainnya	252.000.000	239.925.000	95,21	Kurang Efisien
Jumlah Belanja Modal	2.249.392.000	2.003.511.413	89,07	Cukup Efisien

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa

Timur Tahun 2019

Berdasarkan tabel 4.15 dapat diketahui belanja modal Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur tahun 2019 sudah berjalan cukup efektif, meskipun mengalami penurunan dalam jumlah anggaran belanja modal dan jumlah realisasinya. Dengan jumlah anggaran belanja modal yang telah ditetapkan sebesar Rp 2.249.392.000 dan terealisasi sebesar Rp 2.003.511.413 menghasilkan rasio sebesar 89,07%. Penggunaan anggaran belanja modal pada tahun ini paling banyak dialokasikan pada belanja modal peralatan dan mesin.

Tabel 4.16 Rincian Belanja Modal Tahun 2020

Uraian	Anggaran	Realisasi	Rasio Efisiensi (%)	Kriteria
Belanja Modal Tanah	-	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.190.550.000	2.079.582.309	94,93	Kurang Efisien
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.000.000	2.975.000	99,17	Kurang Efisien
Belanja Modal Aset Lainnya	293.000.000	190.806.000	65,12	Efisien
Jumlah Belanja Modal	2.486.550.000	2.273.363.309	91,43	Kurang Efisien

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa

Timur Tahun 2020

Mengacu pada rincian tabel 4.16 dapat disimpulkan bahwa belanja modal Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur tahun 2020 berjalan kurang efisien. Apabila dibandingkan dengan periode anggaran sebelumnya yaitu tahun 2019, terjadi peningkatan jumlah anggaran belanja modal dan jumlah realisasinya. Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah anggaran belanja yang telah ditetapkan sebesar Rp 2.486.550.000 dan terealisasi sebesar Rp 2.273.363.309 menghasilkan rasio efisiensi sebesar 91,43%. Untuk penggunaan alokasi belanja modal paling tinggi, masih sama seperti tahun 2019, yaitu pada belanja modal peralatan dan mesin.

4.2.5 Efisiensi Jumlah Belanja

Tabel 4.17 Jumlah Belanja Tahun 2016 – 2020

Tahun	Anggaran	Realisasi	Rasio Efisiensi (%)	Kriteria
2016	110.556.096.075	106.882.504.720	96,68	Kurang Efisien
2017	102.870.783.179	98.876.703.730	96,12	Kurang Efisien
2018	84.859.553.618	82.153.297.184	96,81	Kurang Efisien
2019	93.403.016.200	89.949.892.857	96,30	Kurang Efisien
2020	58.772.999.450	56.696.017.165	96,47	Kurang Efisien

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 – 2020

Dapat dilihat dari tabel 4.17 selama periode anggaran tahun 2016 – 2020 tingkat efisiensi dari jumlah belanja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur mengalami fluktuasi di setiap tahunnya. Angka rasio realisasi untuk anggaran belanja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur selama lima tahun berturut-turut berada di rentang 90% sehingga menimbulkan nilai rasio efisiensi termasuk dalam kriteria kurang efisien.

Berdasarkan prinsip akuntansi dengan laporan keuangan pemerintah daerah dimana dalam laporan realisasi anggaran harus terinci secara jelas mengenai jumlah anggaran yang terealisasi dari anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari

tabel 4.17 tersebut menunjukkan bahwa jumlah realisasi anggaran belanja lebih rendah dari jumlah anggaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, merupakan suatu kondisi dimana Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur berusaha untuk meminimalisir jumlah belanja yang dialokasikan dari jumlah anggaran yang telah ditentukan agar tercapainya suatu efisiensi belanja dan tidak terjadinya defisit kelak di akhir periode. Pada tahun 2016, tercapai realisasi sebesar 96,68% dengan jumlah Rp 106.882.504.720 dari jumlah anggaran yang telah ditentukan sebesar Rp 110.556.096.075 sehingga termasuk ke dalam kriteria kurang efektif. Pada periode anggaran berikutnya, terjadi penurunan jumlah belanja beserta jumlah realisasinya di tahun 2017. Penurunan ini disebabkan oleh adanya pengurangan yang cukup signifikan pada jumlah anggaran belanja barang dan jasa sehingga jumlah belanja terbilang lebih rendah dari periode sebelumnya. Dengan jumlah anggaran belanja sebesar Rp 102.870.783.179 dan terealisasi sebesar Rp 98.876.703.730, menghasilkan rasio efisiensi sebesar 96,12% dan tergolong kurang efisien. Di tahun 2018 juga mengalami penurunan jumlah belanja yang cukup drastis apabila dibandingkan dengan tahun 2017. Turunnya jumlah pengalokasian pada belanja barang dan jasa menjadi penyebab penurunan jumlah belanja. Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah anggaran belanja sebesar Rp 84.859.553.618 dan terealisasi sebesar Rp 82.153.297.184. Pada periode berikutnya yaitu tahun 2019, terdapat kenaikan pada jumlah anggaran belanja yaitu sebesar Rp 93.403.016.200 dengan jumlah realisasi sebesar Rp 89.949.892.857. Selanjutnya, di tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup banyak pada jumlah anggaran belanja dan tentu saja jumlah realisasinya juga lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2019. Di tahun ini, anggaran belanja ditetapkan sebesar Rp 58.772.999.450 dan terealisasi sebesar Rp 56.696.017.165.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat efisiensi belanja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016 – 2020 mengalami fluktuasi di setiap tahun. Periode anggaran dengan tingkat efisiensi tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 96,81% . Selama lima periode berturut-turut terjadi penurunan jumlah belanja, dimana hal ini merupakan suatu langkah guna meminimalisasikan jumlah belanja yang dikeluarkan agar

terlaksananya efisiensi belanja. Terkait dengan hal tersebut, pengukuran efisiensi tidak hanya dilihat dari sisi penyerapan anggaran saja, melainkan juga dilihat faktor-faktor lain seperti terlaksananya dengan baik program-program yang menunjang operasional suatu instansi tersebut. Untuk melihat kinerja pada sisi efisiensi dengan hasil kriteria kurang efisien, tidak dapat disimpulkan secara langsung untuk kriteria kurang efisien dikarenakan perlu juga melihat sisi faktor lainnya selain sisi penyerapan anggaran.

4.3 Solusi

Terkait dengan pengukuran efektivitas pendapatan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur menunjukkan hasil pengukuran sudah sangat baik, dimana pada periode anggaran tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 memiliki kriteria rasio efektivitas yang sangat efektif dan hanya pada tahun 2018 yang memiliki kriteria kurang efektif. Oleh sebab itu, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur dapat memperbaiki kembali tingkat efektivitas pendapatannya dengan cara meningkatkan komponen pendapatan yang dapat menyumbang lebih banyak terhadap realisasi anggaran. Contohnya adalah dengan meningkatkan pendapatan retribusi daerah dari hasil pengelola kekayaan daerah seperti memanfaatkan sewa lahan bagian dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur untuk digunakan sebagai sewa gedung kantor, sewa pengelolaan lapangan tenis, sewa lahan untuk pendirian koperasi, sewa lahan untuk kantin, serta sewa lahan untuk pendirian mesin *Automatic Teller Machine* (ATM). Tidak hanya itu, langkah perbaikan selanjutnya yaitu memaksimalkan program dana bergulir yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dari potensi pendapatan atas bunga angsuran dari kredit dana bergulir tersebut.

Tingkat efisiensi belanja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur dalam periode anggaran tahun 2016 sampai dengan 2020 menunjukkan hasil yang kurang efisien dikarenakan nilai rasio efisiensi masih berada di angka 90%. Terkait dengan hal tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur dapat meningkatkan efisiensi belanja dengan cara mengurangi nominal belanja daerah yang cukup tinggi. Seperti pada belanja modal peralatan dan mesin yang dalam

periode anggaran dua tahun terakhir yaitu tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami peningkatan jumlah realisasi belanja yang cukup signifikan. Untuk mengatasi hal tersebut sebaiknya melakukan perawatan terhadap peralatan dan mesin yang telah tersedia agar dapat memiliki masa umur manfaat yang lebih panjang serta memanfaatkan sebaik mungkin peralatan dan mesin tersebut untuk kegiatan operasional.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait analisis efektivitas pendapatan dan efisiensi belanja pada laporan realisasi anggaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas pendapatan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur sudah tergolong efektif dikarenakan rasio efektivitas berada di rentang 90%-100% bahkan ada beberapa pos yang memiliki rasio lebih dari 100% dimana merupakan kondisi yang sangat efektif. Sementara itu, tingkat efisiensi belanja pendapatan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur tergolong kurang efisien, dikarenakan terdapat beberapa pos anggaran yang mengalami peningkatan pada belanja operasi maupun belanja modal sehingga nilai rasionya masih berada di angka 90%. Dengan hasil kurang efisien ini, tidak dapat menjadi tolok ukur untuk sebuah pengukuran efisiensi, dikarenakan perlu juga melihat sisi faktor lainnya selain dari sisi penyerapan anggaran.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur sebaiknya lebih mengidentifikasi potensi daerah agar terdapat peluang baru sebagai sumber pendapatan khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, dapat dengan cara meningkatkan pendapatan yang bisa diperoleh melalui pemanfaatan retribusi daerah dari hasil pengelola kekayaan daerah dan pemanfaatan program dana bergulir. Dengan demikian, jumlah realisasi menjadi lebih tinggi dari jumlah yang telah dianggarkan sehingga makin tinggi pula tingkat efektivitas pendapatan.
2. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur sebaiknya dapat mengupayakan beberapa langkah pasti guna meminimalisir dan menekan jumlah pengeluaran

belanja agar tingkat efisiensi belanja dapat meningkat, meminimalisir jumlah pengeluaran belanja serta terlaksananya efisiensi belanja.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Erlangga.
- Erlina., Rambe, Omar Sakti., dan Rasdianto. 2015. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., dan Kusufi, M.S. 2016. Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Mahmudi. 2015. Manajemen kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, Mohamad. 2016. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Mardiasmo. 2011. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Surabaya: Gubernur Jawa Timur.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- Sedarmayanti. 2014. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Jakarta: Mandar Maju.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: ALFABETA.
- Ulum, Ihyaul. 2012. Audit Sektor Publik. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Undang-Undang Republik Indonesia 1945 Pasal 33 Ayat 4.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Laporan Realisasi Anggaran Dinas Koperasi Tahun 2016

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN, PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016**

URUSAN PEMERINTAHAN : (115) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

ORGANISASI : (0100) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Prov. Jatim

Kode Rekening										Uraian	Anggaran Setelah P.APBD	Jumlah Tahun 2016	Jumlah S.d Tahun Lalu	Jumlah S.d Tahun 2016	%	Lebih/(Kurang)
1										2	3	4	5	6=(4+5)	7	8=(6-3)
1	15	0100	00	000	4					PENDAPATAN DAERAH	352.800.000,00	541.269.646,99	0,00	541.269.646,99	153,42	188.469.646,99
1	15	0100	00	000	4	1				PENDAPATAN ASLI DAERAH	352.800.000,00	541.269.646,99	0,00	541.269.646,99	153,42	188.469.646,99
1	15	0100	00	000	4	1	2			RETRIBUSI DAERAH	20.000.000,00	24.930.000,00	0,00	24.930.000,00	124,65	4.930.000,00
1	15	0100	00	000	4	1	2	02		Retribusi Jasa Usaha	20.000.000,00	24.930.000,00	0,00	24.930.000,00	124,65	4.930.000,00
1	15	0100	00	000	4	1	2	02	01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	20.000.000,00	24.930.000,00	0,00	24.930.000,00	124,65	4.930.000,00
1	15	0100	00	000	4	1	4			LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	332.800.000,00	516.339.646,99	0,00	516.339.646,99	155,15	183.539.646,99
1	15	0100	00	000	4	1	4	10		Pendapatan dari Pengembalian	0,00	181.035.700,00	0,00	181.035.700,00	0,00	181.035.700,00
1	15	0100	00	000	4	1	4	10	05	Pendapatan Dan Pengembalian Pembayaran Belanja	0,00	181.035.700,00	0,00	181.035.700,00	0,00	181.035.700,00
1	15	0100	00	000	4	1	4	13		Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	320.000.000,00	320.503.946,99	0,00	320.503.946,99	100,16	503.946,99
1	15	0100	00	000	4	1	4	13	01	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	320.000.000,00	320.503.946,99	0,00	320.503.946,99	100,16	503.946,99
1	15	0100	00	000	4	1	4	14		Pendapatan Sewa	12.800.000,00	14.800.000,00	0,00	14.800.000,00	115,63	2.000.000,00
1	15	0100	00	000	4	1	4	14	01	Pendapatan Sewa Tanah	12.800.000,00	14.800.000,00	0,00	14.800.000,00	115,63	2.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH											352.800.000,00	541.269.646,99	0,00	541.269.646,99	153,42	188.469.646,99
1	15	0100	00	000	5					BELANJA DAERAH	110.556.096.075,00	106.882.504.720,00	0,00	106.882.504.720,00	96,68	(3.673.591.355,00)
1	15	0100	00	000	5	1				BELANJA TIDAK LANGSUNG	16.896.030.325,00	15.618.150.750,00	0,00	15.618.150.750,00	92,44	(1.277.879.575,00)
1	15	0100	00	000	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	16.896.030.325,00	15.618.150.750,00	0,00	15.618.150.750,00	92,44	(1.277.879.575,00)
1	15	0100	00	000	5	1	1	01		Gaji dan Tunjangan	8.780.224.000,00	8.169.749.530,00	0,00	8.169.749.530,00	93,05	(610.474.470,00)
1	15	0100	00	000	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	6.922.633.000,00	6.558.730.590,00	0,00	6.558.730.590,00	94,74	(363.902.410,00)
1	15	0100	00	000	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	678.795.000,00	595.448.025,00	0,00	595.448.025,00	87,72	(83.346.975,00)

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kode Rekening								Uraian	Anggaran Setelah P.APBD	Jumlah Tahun 2016	Jumlah S.d Tahun Lalu	Jumlah S.d Tahun 2016	%	Lebih/(Kurang)		
1								2	3	4	5	6=(4+5)	7	8=(6-3)		
1	15	0100	00	000	5	1	01	03	Tunjangan Jabatan	294.606.000,00	262.570.000,00	0,00	262.570.000,00	89,13	(32.036.000,00)	
1	15	0100	00	000	5	1	01	04	Tunjangan Fungsional	110.495.000,00	104.510.000,00	0,00	104.510.000,00	94,58	(5.985.000,00)	
1	15	0100	00	000	5	1	01	05	Tunjangan Umum	270.437.000,00	233.170.000,00	0,00	233.170.000,00	86,22	(37.267.000,00)	
1	15	0100	00	000	5	1	01	06	Tunjangan Beras	389.102.000,00	316.040.880,00	0,00	316.040.880,00	81,22	(73.061.120,00)	
1	15	0100	00	000	5	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	113.868.000,00	99.198.284,00	0,00	99.198.284,00	87,12	(14.669.716,00)	
1	15	0100	00	000	5	1	01	08	Pembulatan Gaji	288.000,00	81.751,00	0,00	81.751,00	28,39	(206.249,00)	
1	15	0100	00	000	5	1	02		Tambahan Penghasilan PNS	8.115.171.400,00	7.448.401.220,00	0,00	7.448.401.220,00	91,78	(666.770.180,00)	
1	15	0100	00	000	5	1	02	06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	8.115.171.400,00	7.448.401.220,00	0,00	7.448.401.220,00	91,78	(666.770.180,00)	
1	15	0100	00	000	5	1	05		Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	634.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(634.925,00)	
1	15	0100	00	000	5	1	05	01	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	634.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(634.925,00)	
1	15	0100	00	000	5	2			BELANJA LANGSUNG	93.660.065.750,00	91.264.353.970,00	0,00	91.264.353.970,00	97,44	(2.395.711.780,00)	
1	15	0100	01						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.101.508.296,00	2.080.793.382,00	0,00	2.080.793.382,00	99,01	(20.714.914,00)	
1	15	0100	01	019					Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	2.101.508.296,00	2.080.793.382,00	0,00	2.080.793.382,00	99,01	(20.714.914,00)	
1	15	0100	01	019	5	2	1		BELANJA PEGAWAI	1.546.003.000,00	1.533.010.000,00	0,00	1.533.010.000,00	99,16	(12.993.000,00)	
1	15	0100	01	019	5	2	1	01	Honorarium Kegiatan PNS	188.960.000,00	188.945.000,00	0,00	188.945.000,00	99,99	(15.000,00)	
1	15	0100	01	019	5	2	1	02	Honorarium Tim Pengadaan/Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa PNS	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	45.600.000,00	100,00	0,00	
1	15	0100	01	019	5	2	1	03	Honorarium Pengelola Keuangan, Barang Daerah, dan Sistem Informasi PNS	685.680.000,00	677.380.000,00	0,00	677.380.000,00	98,79	(8.300.000,00)	
1	15	0100	01	019	5	2	1	02	Honorarium Kegiatan Non PNS	32.400.000,00	29.280.000,00	0,00	29.280.000,00	90,37	(3.120.000,00)	
1	15	0100	01	019	5	2	1	02	Honorarium pembantu pelaksana Pengelola Keuangan, Barang Daerah, dan Sistem Informasi Non PNS	51.600.000,00	51.600.000,00	0,00	51.600.000,00	100,00	0,00	
1	15	0100	01	019	5	2	1	02	03	Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non BLUD	317.000.000,00	315.500.000,00	0,00	315.500.000,00	99,53	(1.500.000,00)
1	15	0100	01	019	5	2	1	03	01	Uang Lembur	224.763.000,00	224.705.000,00	0,00	224.705.000,00	99,97	(58.000,00)
1	15	0100	01	019	5	2	2		BELANJA BARANG DAN JASA	555.505.296,00	547.783.382,00	0,00	547.783.382,00	98,61	(7.721.914,00)	
1	15	0100	01	019	5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	172.869.000,00	172.868.955,00	0,00	172.868.955,00	100,00	(45,00)
1	15	0100	01	019	5	2	2	01	12	Biaya Pembelian Buku Cek	2.000.000,00	1.748.000,00	0,00	1.748.000,00	87,40	(252.000,00)

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kode Rekening									Uraian	Anggaran Setelah P.APBD	Jumlah Tahun 2016	Jumlah S.d Tahun Lalu	Jumlah S.d Tahun 2016	%	Lebih/(Kurang)
1									2	3	4	5	6=(4+5)	7	8=(6-3)
1	15	0100	21	010	5	2	06	01	Belanja Cetak dan/atau Penggandaan	5.293.500,00	4.151.000,00	0,00	4.151.000,00	78,42	(1.142.500,00)
1	15	0100	21	010	5	2	11	01	Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	100,00	0,00
1	15	0100	21	010	5	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	47.350.000,00	47.252.992,00	0,00	47.252.992,00	99,80	(97.008,00)
1	15	0100	21	010	5	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	103.500.000,00	101.956.779,00	0,00	101.956.779,00	98,51	(1.543.221,00)
JUMLAH BELANJA DAERAH									110.556.096.075,00	106.882.504.720,00	0,00	106.882.504.720,00	96,68	(3.673.591.355,00)	
SURPLUS / (DEFISIT)									(110.203.296.075,00)	(106.341.235.073,01)	0,00	(106.341.235.073,01)	96,50	3.862.061.001,99	

Surabaya , Tgl. 29-09-2017

AAA
NIP. XXX

Lampiran 2 Laporan Realisasi Anggaran Dinas Koperasi Tahun 2017

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN, PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017**

URUSAN PEMERINTAHAN : (117) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
ORGANISASI : (0100) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode Rekening										Uraian	Anggaran Setelah P.APBD	Jumlah Tahun 2017	Jumlah S.d Tahun Lalu	Jumlah S.d Tahun 2017	%	Lebih/(Kurang)
1										2	3	4	5	6=(4+5)	7	8=(6-3)
1	17	0100	00	000	4					PENDAPATAN DAERAH	353.800.000,00	294.514.059,14	0,00	294.514.059,14	83,24	(59.285.940,86)
1	17	0100	00	000	4	1				PENDAPATAN ASLI DAERAH	353.800.000,00	294.514.059,14	0,00	294.514.059,14	83,24	(59.285.940,86)
1	17	0100	00	000	4	1	2			RETRIBUSI DAERAH	20.000.000,00	23.490.000,00	0,00	23.490.000,00	117,45	3.490.000,00
1	17	0100	00	000	4	1	2	02		Retribusi Jasa Usaha	20.000.000,00	23.490.000,00	0,00	23.490.000,00	117,45	3.490.000,00
1	17	0100	00	000	4	1	2	02	01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	20.000.000,00	23.490.000,00	0,00	23.490.000,00	117,45	3.490.000,00
1	17	0100	00	000	4	1	4			LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	333.800.000,00	271.024.059,14	0,00	271.024.059,14	81,19	(62.775.940,86)
1	17	0100	00	000	4	1	4	06		Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	11.885.048,00	0,00	11.885.048,00	0,00	11.885.048,00
1	17	0100	00	000	4	1	4	06	01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	11.885.048,00	0,00	11.885.048,00	0,00	11.885.048,00
1	17	0100	00	000	4	1	4	10		Pendapatan dari Pengembalian	0,00	67.711.138,00	0,00	67.711.138,00	0,00	67.711.138,00
1	17	0100	00	000	4	1	4	10	03	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
1	17	0100	00	000	4	1	4	10	04	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	3.040.000,00	0,00	3.040.000,00	0,00	3.040.000,00
1	17	0100	00	000	4	1	4	10	05	Pendapatan Dari Pengembalian Pembayaran Belanja	0,00	64.131.138,00	0,00	64.131.138,00	0,00	64.131.138,00
1	17	0100	00	000	4	1	4	13		Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	320.000.000,00	176.627.873,14	0,00	176.627.873,14	55,20	(143.372.126,86)
1	17	0100	00	000	4	1	4	13	01	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	320.000.000,00	176.627.873,14	0,00	176.627.873,14	55,20	(143.372.126,86)
1	17	0100	00	000	4	1	4	14		Pendapatan Sewa	13.800.000,00	14.800.000,00	0,00	14.800.000,00	107,25	1.000.000,00
1	17	0100	00	000	4	1	4	14	01	Pendapatan Sewa Tanah	13.800.000,00	14.800.000,00	0,00	14.800.000,00	107,25	1.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH											353.800.000,00	294.514.059,14	0,00	294.514.059,14	83,24	(59.285.940,86)
1	17	0100	00	000	5					BELANJA DAERAH	102.870.783.179,00	98.876.703.730,00	0,00	98.876.703.730,00	96,12	(3.994.079.449,00)
1	17	0100	00	000	5	1				BELANJA TIDAK LANGSUNG	15.822.448.000,00	14.331.635.733,00	0,00	14.331.635.733,00	90,58	(1.490.812.267,00)

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kode Rekening										Uraian	Anggaran Setelah P.APBD	Jumlah Tahun 2017	Jumlah S.d Tahun Lalu	Jumlah S.d Tahun 2017	%	Lebih/(Kurang)
1										2	3	4	5	6=(4+5)	7	8=(6-3)
1	17	0100	00	000	5	1	1			BELANJA PEGAWAI	15.822.448.000,00	14.331.635.733,00	0,00	14.331.635.733,00	90,58	(1.490.812.267,00)
1	17	0100	00	000	5	1	1	01		Gaji dan Tunjangan	8.272.256.000,00	7.558.437.983,00	0,00	7.558.437.983,00	91,37	(713.818.017,00)
1	17	0100	00	000	5	1	1	01	01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	6.554.378.000,00	6.096.947.580,00	0,00	6.096.947.580,00	93,02	(457.430.420,00)
1	17	0100	00	000	5	1	1	01	02	Tunjangan Keluarga	639.655.000,00	555.042.582,00	0,00	555.042.582,00	86,77	(84.612.418,00)
1	17	0100	00	000	5	1	1	01	03	Tunjangan Jabatan	288.776.000,00	264.945.000,00	0,00	264.945.000,00	91,75	(23.831.000,00)
1	17	0100	00	000	5	1	1	01	04	Tunjangan Fungsional	151.407.000,00	119.578.000,00	0,00	119.578.000,00	78,98	(31.829.000,00)
1	17	0100	00	000	5	1	1	01	05	Tunjangan Umum	247.475.000,00	205.995.000,00	0,00	205.995.000,00	83,24	(41.480.000,00)
1	17	0100	00	000	5	1	1	01	06	Tunjangan Beras	365.877.000,00	293.663.100,00	0,00	293.663.100,00	80,26	(72.213.900,00)
1	17	0100	00	000	5	1	1	01	07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	24.500.000,00	22.185.535,00	0,00	22.185.535,00	90,55	(2.314.465,00)
1	17	0100	00	000	5	1	1	01	08	Pembulatan Gaji	188.000,00	81.186,00	0,00	81.186,00	43,18	(106.814,00)
1	17	0100	00	000	5	1	1	02		Tambahan Penghasilan PNS	7.549.592.000,00	6.773.197.750,00	0,00	6.773.197.750,00	89,72	(776.394.250,00)
1	17	0100	00	000	5	1	1	02	06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	7.549.592.000,00	6.773.197.750,00	0,00	6.773.197.750,00	89,72	(776.394.250,00)
1	17	0100	00	000	5	1	1	05		Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(600.000,00)
1	17	0100	00	000	5	1	1	05	01	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(600.000,00)
1	17	0100	00	000	5	2				BELANJA LANGSUNG	87.048.335.179,00	84.545.067.997,00	0,00	84.545.067.997,00	97,12	(2.503.267.182,00)
1	17	0100	01							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.989.756.600,00	1.965.566.587,00	0,00	1.965.566.587,00	98,78	(24.190.013,00)
1	17	0100	01	019						<i>Pelaksanaan Administrasi Perkantoran</i>	1.989.756.600,00	1.965.566.587,00	0,00	1.965.566.587,00	98,78	(24.190.013,00)
1	17	0100	01	019	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	1.382.924.040,00	1.367.600.040,00	0,00	1.367.600.040,00	98,89	(15.324.000,00)
1	17	0100	01	019	5	2	1	01	01	Honorarium Kegiatan PNS	160.880.000,00	156.740.000,00	0,00	156.740.000,00	97,43	(4.140.000,00)
1	17	0100	01	019	5	2	1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan/Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa PNS	44.400.000,00	44.400.000,00	0,00	44.400.000,00	100,00	0,00
1	17	0100	01	019	5	2	1	01	03	Honorarium Pengelola Keuangan, Barang Daerah, dan Sistem Informasi PNS	501.980.000,00	495.030.000,00	0,00	495.030.000,00	98,62	(6.950.000,00)
1	17	0100	01	019	5	2	1	02	01	Honorarium Kegiatan Non PNS	29.600.000,00	29.600.000,00	0,00	29.600.000,00	100,00	0,00
1	17	0100	01	019	5	2	1	02	02	Honorarium pembantu pelaksana Pengelola Keuangan, Barang Daerah, dan Sistem Informasi Non PNS	57.900.000,00	57.900.000,00	0,00	57.900.000,00	100,00	0,00
1	17	0100	01	019	5	2	1	03	03	Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non BLUD	349.028.040,00	349.028.040,00	0,00	349.028.040,00	100,00	0,00
1	17	0100	01	019	5	2	1	03	01	Uang Lembur	239.136.000,00	234.902.000,00	0,00	234.902.000,00	98,23	(4.234.000,00)

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kode Rekening									Uraian	Anggaran Setelah P.APBD	Jumlah Tahun 2017	Jumlah S.d Tahun Lalu	Jumlah S.d Tahun 2017	%	Lebih/(Kurang)
1									2	3	4	5	6=(4+5)	7	8=(6-3)
1	17	0100	21	010	5	2	3	27	Belanja Modal Tidak Berwujud	49.126.000,00	49.126.000,00	0,00	49.126.000,00	100,00	0,00
1	17	0100	21	010	5	2	3	27 01	Belanja Modal Software	49.126.000,00	49.126.000,00	0,00	49.126.000,00	100,00	0,00
JUMLAH BELANJA DAERAH										102.870.783.179,00	98.876.703.730,00	0,00	98.876.703.730,00	96,12	(3.994.079.449,00)
SURPLUS / (DEFISIT)										(102.516.983.179,00)	(98.582.189.670,86)	0,00	(98.582.189.670,86)	96,16	3.934.793.508,14

Sidoarjo , Tgl. 31-12-2017

Dr. Mas Purnomo Hadi, MM
NIP. 19610818 198403 1 005

Lampiran 3 Laporan Realisasi Anggaran Dinas Koperasi Tahun 2018

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2018

AK 31 Lampiran 1.2

URUSAN PEMERINTAHAN : (117) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
 ORGANISASI : (0100) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5(=4-3)	6
4	PENDAPATAN DAERAH	339,800,000.00	238,663,027.00	(103,136,973.00)	(30.35)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	339,800,000.00	238,663,027.00	(103,136,973.00)	(30.35)
4.1.2	RETRIBUSI DAERAH	5,000,000.00	3,000,000.00	(2,000,000.00)	(40.00)
4.1.4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	334,800,000.00	233,663,027.00	(101,136,973.00)	(30.21)
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		339,800,000.00	238,663,027.00	(103,136,973.00)	(30.35)
5	BELANJA DAERAH	84,859,553,618.00	82,153,297,184.00	(2,706,256,434.00)	(3.19)
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	15,170,951,700.00	14,188,607,537.00	(982,344,163.00)	(6.48)
5.1.1	BELANJA PEGAWAI	15,170,951,700.00	14,188,607,537.00	(982,344,163.00)	(6.48)
5.2	BELANJA LANGSUNG	69,688,601,918.00	67,964,689,647.00	(1,723,912,271.00)	(2.47)
5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7,709,546,000.00	7,585,983,000.00	(123,563,000.00)	(1.60)
5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	59,523,210,818.00	57,996,919,362.00	(1,526,291,456.00)	(2.56)
5.2.3	BELANJA MODAL	2,455,845,100.00	2,381,787,285.00	(74,057,815.00)	(3.02)
JUMLAH BELANJA DAERAH		84,859,553,618.00	82,153,297,184.00	(2,706,256,434.00)	(3.19)
SURPLUS / (DEFISIT)		(84,519,753,618.00)	(81,916,634,157.00)	2,603,119,461.00	3.08
Sisa Lebih (Lebih) Pembiayaan Anggaran (SILPA)		(84,519,753,618.00)	(81,916,634,157.00)	2,603,119,461.00	3.08

Lampiran 4 Laporan Realisasi Anggaran Dinas Koperasi Tahun 2019

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2019

AKLS LRA

URUSAN PEMERINTAHAN : (117) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
 ORGANISASI : (0100) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Nomor Urut 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan 3	Realisasi 4	(Rp) 5(=4-3)	% 6
	PENDAPATAN DAERAH	350.000.000,00	422.680.407,49	72.680.407,49	20,77
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	350.000.000,00	422.680.407,49	72.680.407,49	20,77
1.1.1	PAJAK DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	RETRIBUSI DAERAH	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
1.1.3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	345.000.000,00	417.680.407,49	72.680.407,49	21,07
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	BANTUAN KEUANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	PENDAPATAN HIBAH	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	PENDAPATAN DANA DARURAT	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	350.000.000,00	422.680.407,49	72.680.407,49	20,77
	BELANJA	93.403.016.200,00	89.949.892.857,00	(3.453.123.343,00)	(3,70)
2.1	BELANJA OPERASI	91.153.624.200,00	87.946.381.444,00	(3.207.242.756,00)	(3,52)
2.1.1	BELANJA PEGAWAI	33.324.954.638,00	31.864.023.341,00	(1.460.931.297,00)	(4,38)
2.1.2	BELANJA BARANG DAN JASA	57.828.669.562,00	56.082.358.103,00	(1.746.311.459,00)	(3,02)
2.1.3	BELANJA BUNGA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	BELANJA SUBSIDI	0,00	0,00	0,00	0,00

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Nomor Urut 1	Uraian 2	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan 3	Realisasi 4	(Rp) 5(=4-3)	% 6
2.1.5	BELANJA HIBAH	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	BELANJA MODAL	2.249.392.000,00	2.003.511.413,00	(245.880.587,00)	(10,93)
2.2.1	BELANJA MODAL TANAH	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	1.972.392.000,00	1.739.166.413,00	(233.225.587,00)	(11,82)
2.2.3	BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA	25.000.000,00	24.420.000,00	(580.000,00)	(2,32)
2.2.6	BELANJA MODAL ASET LAINNYA	252.000.000,00	239.925.000,00	(12.075.000,00)	(4,79)
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1	BELANJA TIDAK TERDUGA	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA		93.403.016.200,00	89.949.892.857,00	(3.453.123.343,00)	(3,70)
	TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	TRANSFER BAGI HASIL PAJAK DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN		0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH TRANSFER BANTUAN KEUANGAN		0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(93.053.016.200,00)	(89.527.212.449,51)	3.525.803.750,49	3,79
	PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	PENCAIRAN DANA CADANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	HASIL PENJUALAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	0,00	0,00	0,00	0,00

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah /(Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5(=4-3)	6
4.1.4	PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5	PENERIMAAN KEMBALI PEMBERIAN PINJAMAN	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6	PENERIMAAN PIUTANG DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7	PENERIMAAN KEMBALI PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.8	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH LAIN YANG SAH	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2	PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3	PEMBAYARAN POKOK UTANG	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4	PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.5	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH LAIN YANG DIPERLUKAN	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PEMBIAYAAN		0,00	0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO		0,00	0,00	0,00	0,00
Sisa Lebih (Lebih) Pembiayaan Anggaran (SILPA)		(93.053.016.200,00)	(89.527.212.449,51)	3.525.803.750,49	3,79

Lampiran 5 Laporan Realisasi Anggaran Dinas Koperasi Tahun 2017

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

AKLS LRA

URUSAN PEMERINTAHAN : (117) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

ORGANISASI : (0100) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5(=4-3)	6
	PENDAPATAN DAERAH	217.300.000,00	401.203.731,42	183.903.731,42	84,63
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	217.300.000,00	401.203.731,42	183.903.731,42	84,63
1.1.1	PAJAK DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	RETRIBUSI DAERAH	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
1.1.3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	212.300.000,00	396.203.731,42	183.903.731,42	86,62
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	BANTUAN KEUANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	PENDAPATAN HIBAH	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	PENDAPATAN DANA DARURAT	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	217.300.000,00	401.203.731,42	183.903.731,42	84,63
	BELANJA	58.772.999.450,00	56.696.017.165,00	(2.076.982.285,00)	(3,53)
2.1	BELANJA OPERASI	56.286.449.450,00	54.422.653.856,00	(1.863.795.594,00)	(3,31)
2.1.1	BELANJA PEGAWAI	28.775.784.200,00	27.991.309.764,00	(784.474.436,00)	(2,73)
2.1.2	BELANJA BARANG DAN JASA	27.510.665.250,00	26.431.344.092,00	(1.079.321.158,00)	(3,92)
2.1.3	BELANJA BUNGA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	BELANJA SUBSIDI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	BELANJA HIBAH	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	BELANJA MODAL	2.486.550.000,00	2.273.363.309,00	(213.186.691,00)	(8,57)

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5(=4-3)	6
2.2.1	BELANJA MODAL TANAH	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	2.190.550.000,00	2.079.582.309,00	(110.967.691,00)	(5,07)
2.2.3	BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA	3.000.000,00	2.975.000,00	(25.000,00)	(0,83)
2.2.6	BELANJA MODAL ASET LAINNYA	293.000.000,00	190.806.000,00	(102.194.000,00)	(34,88)
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1	BELANJA TIDAK TERDUGA	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA		58.772.999.450,00	56.696.017.165,00	(2.076.982.285,00)	(3,53)
	TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	TRANSFER BAGI HASIL PAJAK DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN		0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH TRANSFER BANTUAN KEUANGAN		0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(58.555.699.450,00)	(56.294.813.433,58)	2.260.886.016,42	3,86
	PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	PENCAIRAN DANA CADANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	HASIL PENJUALAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5	PENERIMAAN KEMBALI PEMBERIAN PINJAMAN	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6	PENERIMAAN PIUTANG DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7	PENERIMAAN KEMBALI PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.8	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH LAIN YANG SAH	0,00	0,00	0,00	0,00

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah /(Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5(=4-3)	6
4.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2	PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3	PEMBAYARAN POKOK UTANG	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4	PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.5	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH LAIN YANG DIPERLUKAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sisa Lebih (Lebih) Pembiayaan Anggaran (SILPA)	(58.555.699.450,00)	(56.294.813.433,58)	2.260.886.016,42	3,86

Lampiran 6 Kartu Bimbingan Tugas Akhir (TA)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RISET
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS VOKASI

Jl. Dharmawangsa Dalam No. 28-30 (Kampus B) Surabaya 60286 Telp. 031-
5033869, 5053156, Fax. 99005114, Website: vokasi.unair.ac.id, email:
info@vokasi.unair.ac.id

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR (TA)

Nama Mahasiswa : Nastiti Ayu Nurhasanah
NIM : 151910613069
Judul TA : Analisis Efektivitas Pendapatan dan Efisiensi Belanja Pada
Laporan Realisasi Anggaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur
Dosen Pembimbing : Izmi Dwira Eriani, S.A., M.A

Tanggal	Topik Konsultasi	Saran Dosen	TTD Mahasiswa	TTD Pembimbing
05/03/22	Penentuan topik	Perbaikan pada topik yang akan dibahas		Li
28/03/22	Pengajuan judul	Perbaikan pada judul		Li
06/04/22	Penentuan judul	Perbaikan pada judul		Li
07/04/22	BAB 1 Pendahuluan	Perbaikan pada halaman sampul penggunaan logo UNAIR dan latar belakang		Li
18/04/22	BAB 1 Pendahuluan	Perbaikan pada rumusan masalah		Li
20/04/22	BAB 2 Tinjauan Pustaka	Perbaikan pada materi		Li
09/06/22	BAB 3 Kajian Studi Kasus	Perbaikan pada metode kajian		Li
14/06/22	BAB 4 Pembahasan	Perbaikan pada hasil pelaksanaan		Li
21/06/22	BAB 4 Pembahasan	Perbaikan pada analisis data		Li
24/06/22	BAB 4 Pembahasan	Perbaikan pada kendala dan solusi		Li
28/06/22	BAB 5 Kesimpulan & Saran	Perbaikan pada kesimpulan dan saran		Li